

**UPAYA *FRAMING* WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP
INVESTASI TIONGKOK PADA HILIRISASI NIKEL MOROWALI**

2020-2025

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RATNA AYU OKTAVIA PUTRI

22323032

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya *Framing* WALHI Sulawesi Tengah Terhadap Investasi Tiongkok Pada Hilirisasi Nikel Morowali 2020-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

18 Desember 2025



Ratna Ayu Oktavia Putri

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
ABSTRAK	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	10
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 Jenis Penelitian	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	11
1.8.4 Proses Penelitian	11
1.9 Sistematika Pembahasan	12
BAB II	13
RESPONS WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP PERSOALAN TAMBANG DI INDONESIA	13
2.1 Investasi Tambang Nikel Tiongkok di Indonesia	14
2.2 Respons WALHI terhadap Tambang Nikel Tiongkok	19
BAB III	25
ANALISIS UPAYA FRAMING WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP HILIRISASI NIKEL DI MOROWALI 2020-2025	24
3.1 Diagnostik	27
3.1.1 Aspek Struktural	27
3.1.2 Aspek Ekologis dan Sosial	29
3.1.3 Aspek Ekonomi dan Politik	31
3.2 Prognostik	35
3.2.1 Moratorium dan Evaluasi PLTU Captive	34
3.2.2 Transisi Energi	36
3.3 Motivasi	40

BAB IV	48
PENUTUP	48
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pilar Konsep <i>Framing</i>	9
Tabel 2. Luas Area Pertambangan Menurut Provinsi	15
Tabel 3. Pabrik Peleburan Nikel Yang Ada Dan Yang Direncanakan di Distrik Morowali, 2024	16
Tabel 4. Perbedaan Fokus Advokasi WALHI	21
Tabel 5. <i>Framing</i> Diagnostik WALHI Sulawesi Tengah	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Produksi Komoditas Mineral

32

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana WALHI Sulawesi Tengah membangun *framing* terhadap isu hilirisasi nikel di Morowali pada tahun 2020-2025. Isu ini menjadi penting karena hilirisasi nikel mendorong masuknya investasi Tiongkok melalui perusahaan seperti Tsingshan Group dan PT IMIP, yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan lingkungan serta ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan teori *framing* dari Snow dan Benford, yang terdiri dari tiga pilar yaitu diagnostik, prognostik, dan motivasi. Kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana WALHI menyoroti masalah, menawarkan solusi, serta mendorong keterlibatan publik. Berdasarkan analisis laporan publikasi, siaran pers, dan wawancara dengan WALHI Sulawesi Tengah, penelitian ini menemukan bahwa WALHI membangun *framing* yang menekankan kerusakan ekologis, kerentanan masyarakat, dan lemahnya pengawasan negara. WALHI juga mendorong alternatif pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam advokasi. Temuan ini menunjukkan bahwa *framing* menjadi strategi penting bagi WALHI dalam mengkritisi model pembangunan ekstraktif dan dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat mengenai investasi nikel di Indonesia.

Kata-kata kunci: *framing*, hilirisasi nikel, Morowali, Tiongkok, WALHI

ABSTRACT

This research examines how WALHI Central Sulawesi constructs its framing of the nickel downstreaming issue in Morowali during 2020–2025. This issue is significant because the downstreaming policy has encouraged the entry of Chinese investment through companies such as Tsingshan Group and PT IMIP, which has led to various environmental problems and tensions between economic interests and sustainability. This study employs Snow and Benford’s framing theory, which consists of three pillars: diagnostic, prognostic, and motivational framing. This framework is used to understand how WALHI identifies problems, proposes solutions, and encourages public involvement. Based on the analysis of public reports, press releases, and interviews with WALHI Central Sulawesi, the research finds that WALHI constructs framing that highlights ecological damage, community vulnerability, and weak state oversight. WALHI also promotes more sustainable development alternatives and strengthens community participation in advocacy. These findings show that framing serves as an important strategy for WALHI in criticizing extractive development models and shaping public perspectives regarding nickel investment in Indonesia.

Keywords: *China, framing, nickel downstreaming, Morowali, WALHI*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan dan krisis iklim global semakin menguat seiring dengan meningkatnya efektivitas industrialisasi, termasuk di Indonesia. Proses industrialisasi yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial. Salah satu bentuk industrialisasi yang menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial adalah proyek hilirisasi nikel, khususnya di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Morowali merupakan salah satu wilayah dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, sehingga dijadikan lokasi strategis untuk pengembangan industri hilirisasi nikel (Khaldun 2024, 156).

Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekspor (Pribadi 2020). Dalam praktiknya, program hilirisasi nikel di Indonesia melibatkan investasi asing dalam skala besar, terutama dari Tiongkok. Keterlibatan Tiongkok tidak hanya dari sektor ekonomi, tetapi juga strategis, dengan mengingat nikel merupakan bahan baku penting dalam rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai kendaraan listrik dan transisi energi (Daly and Zhang 2021).

Dalam konteks hubungan internasional, hilirisasi nikel di Morowali mencerminkan keterkaitan antara kebijakan industri nasional Indonesia dengan

kepentingan global, terutama kebutuhan mineral strategis seperti Tsingshan Group melalui kawasan IMIP yang menunjukkan bagaimana kebijakan larangan ekspor bijih nikel dalam mendorong percepatan pembangunan smelter dan kawasan industri.

Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada 2020, investasi asing di sektor pengolahan nikel meningkat pesat. Pemerintah Indonesia memandang hilirisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, di balik klaim pertumbuhan ekonomi tersebut, muncul berbagai dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, seperti perubahan lanskap ekologis, pencemaran lingkungan, konflik lahan, serta meningkatnya risiko keselamatan kerja (Myllyvirta et al. 2024, 61). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan nasional dan realitas yang dialami masyarakat di sekitar kawasan industri.

Morowali dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut merepresentasikan wajah hilirisasi nikel di Indonesia yang paling intensif dalam pengoperasiannya. Berbeda dengan wilayah penghasil nikel lainnya, Morowali menjadi pusat industri nikel terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan konsentrasi smelter, PLTU Captive, dan tenaga kerja dalam skala besar. Pada periode 2015-2024, nilai investasi kumulatif di kawasan IMIP dilaporkan mencapai sekitar US\$34,3 miliar, menjadikannya salah satu proyek industri nikel terbesar di Indonesia (Zuhdi and Media Indonesia 2024).

Dampak dari masifnya aktivitas industri di Morowali mendorong keterlibatan organisasi lingkungan hidup, khususnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI menyoroti adanya ketimpangan antara klaim

keberhasilan hilirisasi dengan kondisi lingkungan dan sosial di lapangan. WALHI Sulawesi Tengah secara konsisten mengangkat isu pencemaran, konflik agraria, kecelakaan kerja, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan, terutama sejak kebijakan larangan ekspor nikel diberlakukan pada 2020 (WALHI 2023).

Pemilihan WALHI Sulawesi Tengah sebagai subjek penelitian, didasarkan pada karakteristiknya sebagai organisasi advokasi lingkungan yang memiliki jaringan nasional dan bekerja secara langsung di tingkat lokal. Berbeda dengan organisasi lingkungan internasional yang cenderung berfokus pada kampanye global, WALHI Sulawesi Tengah membangun narasi advokasi berdasarkan temuan lapangan, siaran pers, pendampingan masyarakat, serta dialog dengan warga terdampak di Morowali (WALHI, n.d.). Selain itu, frekuensi dan konsistensi WALHI Sulawesi Tengah dalam merespons isu hilirisasi nikel sejak 2020-2025 menunjukkan peran organisasi ini dalam membingkai persoalan hilirisasi nikel sebagai isu lingkungan, sosial, dan politik.

Dengan demikian, hilirisasi nikel di Morowali tidak hanya dapat dipahami sebagai proyek ekonomi semata, tetapi juga sebagai wadah antara kepentingan negara, investasi asing, dan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian ini berfokus pada, bagaimana WALHI Sulawesi Tengah membingkai persoalan hilirisasi nikel di Morowali sebagai bagian dari advokasi lingkungan, serta bagaimana *framing* tersebut digunakan untuk mengkritisi model pembangunan ekstraktif yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya *framing* WALHI Sulawesi Tengah terhadap hilirisasi nikel di Morowali 2020-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran WALHI Sulawesi Tengah dalam merespons persoalan tambang di Indonesia.
2. Mengidentifikasi upaya *framing* WALHI Sulawesi Tengah terhadap hilirisasi nikel di Morowali 2020-2025.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini difokuskan pada periode 2020-2025 yaitu sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia yang mendorong percepatan program hilirisasi nikel dan ekspansi kawasan industri pengolahan nikel, khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah. Morowali dipilih karena menjadi pusat hilirisasi nikel paling intensif di Indonesia dengan industri dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang didominasi oleh investasi perusahaan Tiongkok, seperti Tsingshan Group.

Rentang waktu 2020-2025 juga menandai meningkatnya aktivitas industri nikel setelah larangan ekspor yang diikuti munculnya berbagai dampak sosial dan ekologis di sekitar kawasan industri, seperti pencemaran lingkungan, konflik agraria, kecelakaan kerja, serta lemahnya perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat lokal. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya respons advokasi lingkungan oleh WALHI Sulawesi Tengah yang secara aktif menyuarakan kritik

melalui siaran pers, Catatan Akhir Tahun (CATAHU), kampanye publik, pendampingan masyarakat, serta aksi protes terhadap proyek hilirisasi nikel dan kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada analisis *framing* WALHI Sulawesi Tengah dalam merespons hilirisasi nikel di Morowali, dengan menggunakan teori *framing* Snow dan Benford yang mencakup *framing* diagnostik, prognostik, dan motivasi. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara WALHI Sulawesi Tengah sebagai aktor advokasi lingkungan, perusahaan industri nikel khususnya PT IMIP dan Tsingshan Group, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam konteks pembangunan industri nikel yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat lokal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kritik WALHI Sulawesi Tengah mengenai hilirisasi nikel di Morowali merupakan isu yang menarik untuk diteliti, sehingga terdapat berbagai jurnal yang saling berhubungan dengan konteks konflik lingkungan dan advokasi kebijakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membahas mengenai isu yang serupa:

Jurnal pertama, berjudul “*Peran WALHI Jakarta sebagai Civil Society Organization dalam Dinamika Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta*”, yang ditulis oleh Paradise dan Lubis (2025) menjelaskan tentang peran WALHI Jakarta dalam upaya penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa WALHI Jakarta berpartisipasi aktif dalam melakukan advokasi, mobilisasi masyarakat, litigasi hukum, dan tekanan politik terhadap pemerintah daerah serta

pengembangnya. WALHI Jakarta juga berperan dalam mengimbangi kekuatan negara dan pasar dengan mewakili masyarakat yang terdampak, seperti komunitas nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan staf perwakilan WALHI Jakarta dan kajian literatur yang mencakup dokumentasi dari WALHI serta sumber relevan lainnya untuk memperkuat hasil analisis. Teori yang digunakan berasal dari Larry Diamond mengenai masyarakat sipil dan teori Bance tentang fungsi CSO yaitu sebagai pengawas, advokat, pembangun kapasitas, penyedia layanan, dan katalis perubahan. Relevansi penelitian ini terletak pada penekanan bahwa WALHI memberikan peran yang besar dalam upaya kebijakan publik di bidang isu lingkungan (Paradise and Lubis 2025).

Jurnal kedua berjudul, “*Advokasi Kebijakan WALHI Sumsel dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir*”, yang ditulis oleh Putri, Febriyanti, dan Nofrima (2023). Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan tentang strategi dan proses advokasi WALHI Sumatera Selatan dalam menangani isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Ilir. Penemuan lainnya adalah peran WALHI Sumsel dalam proses advokasi dan lobi kebijakan kepada pemerintah serta memberikan edukasi atau kampanye kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan karhutla, selain itu advokasi WALHI telah menunjukkan pada peningkatan pemantauan kebijakan dan keterlibatan publik dalam masalah lingkungan. Teori yang digunakan adalah fenomenologis, berfokus pada perspektif 6 individu yang terlibat dalam advokasi lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diaplikasikan dengan teknik Miles and

Hubberman untuk pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta kesimpulan (Putri, Febriyanti, and Nofrima 2024).

Jurnal ketiga berjudul, “*Peran WALHI Sumut dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan*”, yang ditulis oleh Harefa (2021). Jurnal ini berisi pembahasan mengenai peran WALHI dalam menyelesaikan konflik kepemilikan lahan dan pentingnya pelestarian lingkungan di Taman Nasional Gunung Leuser, Resort Sekoci-Lepan. WALHI juga terlibat dengan masyarakat dengan memberikan bantuan, memperjuangkan hak atas tanah, bimbingan dalam menavigasi konflik. Teori yang digunakan berkaitan dengan keadilan lingkungan dan resolusi konflik. Metode dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumenter untuk mengumpulkan catatan tertulis dan arsip yang berkaitan dengan isu, dan teknik pengamatan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai interaksi dan konflik dalam komunitas (Harefa 2021).

Ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa WALHI terlibat aktif dalam advokasi lingkungan, seperti kebijakan reklamasi, pencegahan kebakaran hutan, maupun konflik tenurial, tetapi belum ada yang menelaah secara khusus bagaimana strategi *framing* digunakan oleh WALHI dalam merespons ekspansi industri nikel di Morowali sebagai bentuk pembangunan ekstraktif. Penelitian ini menutup celah tersebut dengan mengkaji bagaimana upaya *framing* WALHI dalam mengkritik dan merespons kebijakan hilirisasi nikel periode 2020-2025 di Morowali, Sulawesi Tengah. Fokus ini penting, karena narasi *framing* menjadi bagian penting dalam strategi advokasi dalam menghadapi proyek investasi asing yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keadilan ekologis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis topik pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *framing* yang dicetuskan oleh Robert D. Benford dan David A. Snow pada karyanya yang berjudul, *Framing. Process and Social Movements: An Overview and Assessment* (Benford and Snow 2000). Konsep *framing* berasal dari kata *frame* atau bingkai untuk membantu menganalisis suatu kejadian atau peristiwa, serta bertujuan untuk memicu timbulnya gerakan calon pendukung dan anggota, mendapatkan simpati dari sekitarnya, dan melemahkan kekuatan pihak yang dilawan (Benford and Snow 2000, 613). Berbeda dengan pendekatan lain yang menekankan struktur politik atau kebijakan, *framing* menempatkan aktor gerakan sosial sebagai subjek aktif dalam membentuk makna dan legitimasi isu.

Framing berfokus pada suatu tindakan atau disebut dengan inti dari sebuah bingkai gerakan sosial. Menurut Benford dan Snow, terdapat 3 pilar yang menjelaskan *framing*, yang pertama adalah *framing* diagnostik dengan mengidentifikasi sebuah permasalahan dan siapa pihak yang dianggap menjadi penyebab dari suatu kejadian, kedua adalah *framing* prognostik yang menawarkan sebuah solusi atau strategi untuk mengatasi permasalahan atau kejadian tersebut, ketiga adalah *framing* motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dan bergabung dalam lingkup aksi kolektif (Benford and Snow 2000, 615).

Tabel 1. Pilar Konsep *Framing*

Jenis Framing	Definisi	Tujuan
Diagnostik	Mengidentifikasi dan menetapkan pihak yang dianggap sebagai penyebab dari suatu kejadian	Membentuk persepsi tentang suatu krisis atau ketidakadilan
Prognostik	Menawarkan solusi serta strategi untuk menyelesaikan dari permasalahan yang terjadi	Memberikan arah atau strategi tindakan
Motivasi	Mendorong partisipasi dengan alasan moral, urgensi, atau tanggung jawab	Menggerakkan audiens untuk terlibat secara aktif dalam aksi kolektif

Sumber:

Framing, Process and Social Movements: An Overview and Assessment

(Benford dan Snow 2000)

Dalam *framing* diagnostik, gerakan sosial bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan atau situasi yang dianggap bermasalah, maka dalam *framing* diagnostik mengidentifikasi apa penyebabnya, pihak mana yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab dan bersalah, meskipun beberapa orang sepakat bahwa munculnya masalah, bukan berarti mereka sepakat mengenai pihak yang disalahkan (Benford and Snow 2000, 616).

Prognostik berfokus pada solusi yang ditawarkan berupa usulan penyelesaian masalah, rencana tindakan, dan strategi pelaksanaan. Jika penyebabnya dianggap sistemik, maka solusinya cenderung bersifat struktural. Prognostik ini tidak terjadi di ruang kosong, melainkan di dalam lingkungan yang

dipenuhi oleh berbagai organisasi, aktor, lawan, target, media, dan pengamat. Oleh karena itu, seringkali *framing* prognostik dikenal dengan istilah *counter framing*. (Benford and Snow 2000, 617).

Terakhir, *framing* motivasi berfokus pada peningkatan dorongan moral dan emosional agar memicu seseorang untuk terlibat dan bertindak, misalnya menunjukkan besarnya atau mendesaknya masalah (*urgency*), keseriusan dampak yang dihasilkan (*severity*), keefektifan tindakan yang dilakukan (*efficacy*), dan tanda bahwa wajib bertindak (*propriety*). Terkadang, adanya penekanan berlebihan terhadap urgensi dan bahaya yang kemungkinan muncul, justru membuat orang merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu permasalahan, sehingga aktivis seringkali menggunakan narasi kewajiban moral agar memiliki semangat yang konsisten (Benford and Snow 2000, 618).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik argumen sementara bahwa kritik yang disampaikan oleh WALHI Sulawesi Tengah dalam rentang tahun 2020-2025 mengenai kebijakan hilirisasi nikel di Morowali yang dibangun melalui konstruksi narasi dengan menggunakan kerangka konsep *framing*. Dalam menyikapi kebijakan hilirisasi nikel ini melibatkan investasi asing yakni Tiongkok, dan WALHI Sulawesi Tengah menjadi perwakilan dari masyarakat dan aktor advokasi lingkungan yang membentuk narasi perlawanan berbasis pada tiga pilar *framing*, yaitu diagnostik (WALHI Sulawesi Tengah menganggap investasi asing nikel merusak lingkungan Morowali), prognostik (masalah tambang harus dihentikan), dan motivasi (WALHI Sulawesi Tengah mendorong masyarakat untuk berjuang

bersama-sama dalam upaya pemberhentian tambang). Adanya tiga pilar tersebut, maka pendekatan *framing* relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang lebih mengutamakan penggunaan kata-kata dibandingkan menggunakan jumlah suatu data (Bryman 2012, 36). Data kualitatif berasal dari bukti representasi visual seperti gambar, peta, wawancara terbuka, pengamatan, dokumen, dan lain-lain (Neuman 2013, 51).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah WALHI Sulawesi Tengah sebagai pihak yang menyampaikan kritik, sedangkan objek yang diteliti adalah upaya *framing* dalam proyek hilirisasi nikel yang menimbulkan perdebatan di masyarakat Morowali.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada direktur WALHI Sulawesi Tengah dan data sekunder dari jurnal, buku, laporan, dan artikel terpercaya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimulai dengan menghimpun publikasi resmi WALHI Sulawesi Tengah mengenai hilirisasi nikel 2020-2025, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tiga pilar konsep *framing*. Terakhir, menarik kesimpulan sementara mengenai konstruksi narasi kritik yang disampaikan oleh WALHI Sulawesi Tengah.

1.9 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam IV bab agar memudahkan pembaca dalam memahami sistematika penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II: RESPONS WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP PERSOALAN TAMBANG DI INDONESIA

Berisi pembahasan umum mengenai peran WALHI Sulawesi Tengah dalam menyikapi dampak yang ditimbulkan oleh proyek tambang di Indonesia.

BAB III: ANALISIS UPAYA *FRAMING* WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP HILIRISASI NIKEL DI MOROWALI TAHUN 2020-2025

Berisi pemaparan tentang prognostik, diagnostik, dan motivasi yang dikaitkan dengan kritik WALHI Sulawesi Tengah mengenai hilirisasi nikel di Morowali tahun 2020-2025.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian serta saran yang ditujukan kepada aktor-aktor terkait serta untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

RESPONS WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP PERSOALAN TAMBANG DI INDONESIA

Bab ini membahas konteks ekonomi politik industri nikel di Indonesia serta menempatkan posisi WALHI sebagai salah satu aktor utama dalam advokasi lingkungan hidup. Pembahasan dimulai dengan mengidentifikasi peta investasi tambang nikel Tiongkok di Indonesia, khususnya ekspansi industri pengolahan dan pemurnian atau smelter, sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi pada tahun 2020. Bagian ini menjelaskan bagaimana investasi tersebut memberikan sejumlah kontribusi ekonomi, tetapi di saat yang sama menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang memunculkan berbagai bentuk kritik dan perlawanan dari masyarakat sipil.

Bab ini juga membahas respons WALHI sebagai organisasi lingkungan terbesar di Indonesia, termasuk bagaimana WALHI secara konsisten mengadvokasi isu pertambangan dan kerusakan ekologis baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagian ini menggambarkan pola advokasi WALHI terhadap persoalan tambang nikel yang berkaitan dengan investasi Tiongkok, serta membandingkan dinamika gerakan WALHI di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebagai dua wilayah strategis yang menjadi lokasi operasi industri nikel.

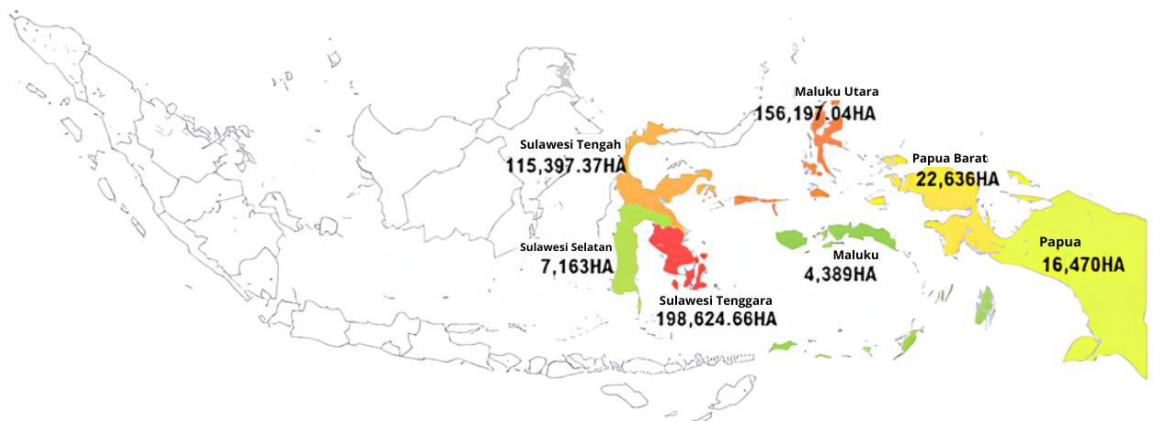
Dengan demikian, pembahasan ini akan menjadi landasan penting untuk memahami konteks umum mengenai investasi nikel, dinamika konflik ekologis di Morowali, dan posisi WALHI dalam advokasi lingkungan. Selain itu, kerangka ini

akan menjadi landasan bagi Bab III yang menganalisis strategi *framing* WALHI melalui dimensi diagnostik, prognostik, dan motivasi.

2.1 Investasi Tambang Nikel Tiongkok di Indonesia

Indonesia memasuki fase baru dalam pengelolaan mineral sejak pemerintah Indonesia melakukan kebijakan hilirisasi nikel, termasuk larangan ekspor bijih nikel mentah yang secara resmi diperkuat pada tahun 2020. Kebijakan tersebut membuat Indonesia mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dalam negeri agar bahan mentah nikel tidak lagi diekspor mentah, melainkan diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah, yaitu hilirisasi nikel (Pribadi 2020).

Gambar 1. Peta wilayah pertambangan nikel menurut provinsi di Indonesia



Sumber: Hati et al. 2024, 5

Indonesia memiliki tujuh provinsi penghasil nikel, yaitu Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan total luas wilayah pertambangan nikel mencapai 520.877,07 hektar (Tabel 2). Di antara wilayah tersebut, Pulau Sulawesi merupakan pusat utama sumber daya nikel nasional. Provinsi dengan wilayah pertambangan nikel terluas adalah Sulawesi Tenggara, disusul oleh Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Dengan

demikian, sebaran cadangan nikel terbesar di Indonesia terfokuskan pada tiga pulau utama, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tabel 2 menyajikan distribusi wilayah pertambangan nikel di seluruh provinsi di Indonesia.

Tabel 2. Luas Area Pertambangan Menurut Provinsi

No.	Provinsi	Luas area pertambangan nikel (hektar)
1.	Sulawesi Tenggara	198,624.66
2.	Maluku Utara	156.197.04
3.	Sulawesi Tengah	115,397.37
4.	Papua Barat	22,636
5.	Papua	16,470
6.	Sulawesi Selatan	7,163
7.	Maluku	4,389
	Total	520.877.07

Sumber: Hati et al. 2024, 4

Masuknya modal dari Tiongkok, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap industri nikel di Indonesia. Sejak 2013, perusahaan asing, khususnya yang berasal dari Tiongkok, telah berinvestasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan nikel di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah. Investasi ini mencakup berbagai smelter dan pabrik pengolahan dengan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF), menjadikan Morowali sebagai salah satu pusat industri nikel.

Berikut ini adalah pemetaan perusahaan asing yang berinvestasi di industri nikel di kawasan Morowali,

**Tabel 3. Pabrik Peleburan Nikel Yang Ada Dan Yang Direncanakan
Di Distrik Morowali, 2024**

No.	Fasilitas Smelter	Teknologi Tungku	Status	Pemegang Saham Mayoritas / Perusahaan Induk	Fokus Produksi
1.	PT Hengjaya Nickel Industry (HNI)	RKEF	O	Nickel Industries Limited (80%), Shanghai Decent Investment (20%)	Nickel Pig Iron (NPI)
2.	PT Ranger Nickel Industry (RNI)	RKEF	O	Nickel Industries Limited (80%), Shanghai Decent Investment (20%)	Nickel Pig Iron (NPI)
3.	PT Oracle Nickel Industry (ONI)	RKEF	O	Nickel Industries Limited (70%), Shanghai Decent Investment (30%)	Nickel Pig Iron (NPI)
4.	PT Sulawesi Mining Investment (SMI)	RKEF	O	Tsingshan Holding Group, Bintang Delapan Group	Nickel Pig Iron (NPI)
5.	PT Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Steel Industry (GCNS)	RKEF	O	Guangdong Guangxin, Jinchuan Group, Tsingshan Holding Group	Nickel Pig Iron (NPI)
6.	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS)	RKEF	O	Tsingshan Holding Group	Stainless Steel
7.	PT Indonesia Ruipu Nickel & Chrome Alloy (IRNC)	RKEF	O	Tsingshan Holding Group	Ferrochrome
8.	PT Cahaya Smelter Indonesia (CSI)	RKEF	O	Merdeka Battery Materials (50.1%), Tsingshan Holding Group (49.9%)	Nickel Pig Iron (NPI)

9.	PT Bukit Smelter Indonesia (BSI)	RKEF	O	Merdeka Battery Materials (50.1%), Tsingshan Holding Group (49.9%)	Nickel Pig Iron (NPI)
10.	PT Lestari Smelter Indonesia (LSI)	RKEF	O	Tsingshan Holding Group	Nickel Pig Iron (NPI)
11.	PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII)	RKEF	O	Walsin Lihwa Corporation	Nickel Pig Iron (NPI)
12.	PT Zhao Hui Nickel (ZHN)	RKEF	O	Merdeka Battery Materials (50.1%), Tsingshan Holding Group (49.9%)	Nickel Pig Iron (NPI)
13.	PT Dexin Steel Indonesia	BF-BOF	O	Delong Holdings (60%), Shanghai Decent Investment, Hanwa Group	Carbon Steel Products*
14.	PT Central Omega Resources Industri Indonesia (CORII)	Blast Furnace	O	PT Central Omega Resources Tbk	Ferronickel
15.	PT Yashi Indonesia Investment	RKEF	O	Zhenshi Holding Group	Ferronickel
16.	PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI)	RKEF	UC	PT Vale Indonesia (49%), China Baowu Steel Group (via TISCO) and Shandong Xinhai (51%)	Ferronickel
17.	PT Huabao Nickel Smelting Indonesia	RKEF	UC	Zhenshi Holding Group	Nickel-based products
18.	PT Central Omega Resources Industri Indonesia (CORII)	Electric Furnace	P	PT Central Omega Resources Tbk	Ferronickel
19.	PT Sinosteel Indonesia Mining	RKEF	P	Sinosteel Corporation	n.a.

*O: Operational, UC: Under Construction, P: Planned; *potentially includes HSLA steel.*

Sumber: iucn.nl 2025

Saat ini terdapat sekitar 19 smelter nikel yang telah beroperasi di Morowali dengan kapasitas produksi mencapai 500.000 hingga 700.000 ton nikel per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 10-14% dari total produksi baja tahan karat atau *stainless steel* global. Selain itu, sejumlah fasilitas smelter yang masih berada dalam konstruksi dan perencanaan diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 800.000 hingga 1.200.000 ton nikel per tahun, atau setara dengan 16-24% dari kapasitas global ([iucn.nl](#) 2025).

Sebagian besar smelter di Morowali menggunakan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) dalam proses produksinya untuk menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) dan ferronickel. NPI memiliki kandungan nikel yang relatif lebih rendah, yakni sekitar 4-15%, sehingga umumnya digunakan dalam produksi baja tahan karat dengan biaya yang lebih efisien. Sementara itu, ferronickel dengan kandungan nikel yang lebih tinggi, yaitu 20-45% digunakan untuk kebutuhan industri baja dengan kualitas yang lebih tinggi. Produk-produk tersebut sebagian besar diekspor ke Tiongkok untuk diproses lebih lanjut menjadi produk baja tahan karat, meskipun kapasitas produksi lanjutan juga telah tersedia di kawasan Morowali ([iucn.nl](#) 2025).

Di tingkat lokal, Tsingshan Holding Group mengoperasikan satu-satunya fasilitas produksi baja tahan karat di kawasan IMIP melalui PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS). Selain itu, PT Dixin Steel Indonesia mengoperasikan fasilitas Basic Oxygen Furnace-Basic oxygen Furnace (BF-BOF) di Morowali yang memproduksi berbagai jenis baja karbon ([iucn.nl](#) 2025).

Dari sudut pandang pemerintah, hilirisasi nikel membawa beberapa manfaat, seperti meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor produk olahan, perluasan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan infrastruktur industri di luar Jawa. Nilai ekspor nikel juga melonjak dari US\$808 juta pada Januari-Agustus 2020 menjadi US\$19,62 miliar pada April 2024 (Situmorang, 2025). Selain itu, pertumbuhan industri smelter juga membuat pemerintah memandang kebijakan ini sebagai strategi untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global bahan baku manufaktur, khususnya baterai kendaraan listrik (Medina 2025).

Perlu dicatat bahwa dominasi asing, terutama Tiongkok dalam kapasitas pengolahan nikel di Indonesia diperkirakan mencapai 75% yang menimbulkan ketergantungan industri dan struktur teknologi yang dikuasai oleh investor asing, terutama dalam teknologi pengolahan laterite untuk industri baterai (Situmorang 2025). Selain itu, percepatan pembangunan smelter dan tambang nikel juga memunculkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Ekspansi industri berkontribusi pada degradasi pesisir, pencemaran perairan, dan kerusakan mangrove di sekitar kawasan industri Morowali. Selain itu, isu keselamatan kerja dan konflik sosial semakin menjadi sorotan di tengah industri ini.

2.2 Respons WALHI terhadap Tambang Nikel Tiongkok

Percepatan hilirisasi nikel di Morowali sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada 2020 memunculkan berbagai dampak lingkungan dan sosial. Ekspansi tambang dan industri pengolahan nikel di kawasan IMIP berkontribusi terhadap deforestasi, banjir, pencemaran udara, pencemaran air, konflik lahan, serta

meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Selain itu, ketergantungan industri nikel terhadap PLTU Captive berbahan bakar batubara turut meningkatkan emisi karbon dan mempengaruhi kesehatan masyarakat di wilayah lingkaran industri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim pemerintah mengenai manfaat hilirisasi dengan realitas yang dialami masyarakat lokal.

Ketimpangan antara narasi pembangunan nasional dan fakta di lapangan mendorong organisasi masyarakat sipil untuk merespons dan mencari keadilan ekologis. Salah satu organisasi yang paling aktif dalam menyuarakan persoalan tersebut adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah. WALHI merupakan organisasi advokasi lingkungan yang berdiri sejak 1980 dan memiliki peran penting dalam gerakan lingkungan di Indonesia. Dalam sejarah pembentukannya, WALHI mendapat dukungan dari Dr. Emil Salim dan melibatkan puluhan organisasi dengan latar belakang yang beragam, mulai dari isu pemberdayaan desa hingga lingkungan hidup (Kalmirah, Prayogo, and Adnan 2024, 5421).

Sebagai organisasi advokasi lingkungan, WALHI berfokus pada isu keadilan ekologis, termasuk dalam sektor pertambangan. Respons WALHI terhadap isu nikel di Morowali semakin menguat sejak 2020, bertepatan dengan diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel mentah per 1 Januari 2020 melalui revisi regulasi mineral dan batubara. Kebijakan tersebut mendorong hilirisasi berjalan secara cepat, ditandai dengan peningkatan produksi Nickel Pig Iron (NPI) dan stainless steel, serta beroperasinya ratusan fasilitas pemrosesan seperti 158 tungku *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF), 7 fasilitas *High Pressure Acid*

Leaching (HPAL), dan berbagai jalur produksi matte (Sangadji, Ginting, and AEER 2023, 8).

Percepatan hilirisasi ini berlangsung bersamaan dengan masuknya investasi Tiongkok, khususnya melalui Tsingshan Group dan kawasan IMIP, yang menjadikan Morowali sebagai pusat industri nikel di Indonesia dengan struktur produksi yang komplit dari tambang, smelter, hingga manufaktur baja tahan karat. Namun, sejak 2020, ekspansi industri tersebut juga memunculkan dampak nyata berupa deforestasi, konflik agraria, peningkatan polusi karbon akibat PLTU batubara, serta kecelakaan kerja yang fatal, termasuk ledakan tungku PT ITSS. Kondisi ini mendorong WALHI Sulawesi Tengah untuk melakukan kritik terbuka dengan menyebut hilirisasi sebagai kerugian ekologis dan bentuk kriminalisasi terhadap warga, serta menuntut penghentian operasi dan sanksi terhadap perusahaan atas pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (WALHI 2023).

Tabel 4. Perbedaan Fokus Advokasi WALHI

Organisasi	Fokus Advokasi
WALHI Nasional	Hilirisasi nikel tingkat nasional, transisi energi yang bersifat palsu
WALHI Sulawesi Tengah	PT IMIP, deforestasi, konflik agraria, kecelakaan kerja, polusi air, dampak sosial, PLTU Captive, limbah smelter
WALHI Sulawesi Selatan	Dampak rantai pasok nikel dari Luwu Timur ke Morowali (lebih difokuskan lintas daerah)

Sumber:

WALHI Nasional, WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Selatan

Dalam jaringan advokasi WALHI, terdapat perbedaan fokus dan skala respons. WALHI nasional cenderung menyoroti isu hilirisasi nikel dalam konteks yang lebih luas, seperti kritik terhadap transisi energi palsu, perluasan PLTU batubara, dan pengelolaan limbah smelter. Sementara itu, WALHI Sulawesi Tengah menjadi organisasi yang paling konsisten mengkritisi industri nikel di Morowali, mengingat wilayah tersebut mengalami dampak lingkungan dan sosial yang paling intensif dibandingkan daerah penghasil nikel lainnya. Fokus advokasi WALHI Sulawesi Tengah mencakup aktivitas IMIP, deforestasi, pencemaran laut, konflik agraria, kecelakaan kerja, serta dampak kesehatan masyarakat pesisir.

Berbeda dengan WALHI Sulawesi Selatan yang lebih menyoroti rantai pasok nikel dari Luwu Timur ke Morowali, WALHI Sulawesi Tengah menunjukkan frekuensi publikasi dan keterlibatan lapangan yang lebih tinggi, termasuk pendampingan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, WALHI Sulawesi Tengah dipandang lebih relevan sebagai objek penelitian, karena berperan sebagai aktor advokasi lokal yang paling terdampak langsung dan memiliki data lapangan yang relatif lengkap.

Sejak pendirian kawasan industri IMIP pada 2013–2015, Tsingshan Group mulai membangun smelter dan infrastruktur pengolahan nikel di Morowali (Musni 2024). Seiring berjalannya waktu, WALHI Sulawesi Tengah mencatat bahwa kecelakaan kerja di kawasan IMIP terjadi secara berulang, khususnya pada periode 2022–2024, termasuk kasus kematian pekerja akibat kecelakaan industri (WALHI 2024). Puncaknya, ledakan tungku di pabrik smelter PT ITSS pada 24 Desember 2023 menewaskan puluhan pekerja, yang kemudian mendorong WALHI nasional

dan WALHI Sulawesi Tengah untuk bersama-sama mendesak pemerintah agar korban memperoleh keadilan (WALHI 2023).

Selain kritik melalui laporan dan siaran pers, WALHI Sulawesi Tengah juga memobilisasi publik melalui kampanye dan aksi kolektif. Salah satunya dilakukan pada 28 September 2024 bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan masyarakat sipil lainnya di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah untuk menyoroti bahaya PLTU Captive. WALHI mencatat bahwa total kapasitas PLTU Captive yang beroperasi maupun dalam tahap konstruksi mencapai 8.345 MW, menjadikannya salah satu sumber emisi dan polusi terbesar di Sulawesi Tengah (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

Kampanye tersebut menekankan dampak polusi udara dan partikel halus (PM2.5) terhadap kesehatan masyarakat, termasuk munculnya penyakit kulit di Desa Tanauge yang sebelumnya tidak pernah terjadi. WALHI Sulawesi Tengah menilai kondisi ini sebagai bentuk kejahatan lingkungan, sementara pemerintah daerah dinilai lalai dalam melakukan pengawasan dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, WALHI merumuskan tuntutan politik berupa moratorium pembangunan smelter baru, penghentian penggunaan energi fosil, serta peninjauan ulang kebijakan yang melegitimasi PLTU Captive (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

Melalui berbagai bentuk advokasi, seperti konferensi pers, publikasi studi, diskusi publik, podcast, dan kampanye kreatif, WALHI Sulawesi Tengah berupaya menyebarkan temuan dampak lingkungan dan sosial hilirisasi nikel serta memperluas kesadaran publik terhadap risiko model pembangunan industri nikel di Morowali (Katili 2025).

BAB III

ANALISIS UPAYA *FRAMING* WALHI SULAWESI TENGAH TERHADAP HILIRISASI NIKEL DI MOROWALI 2020-2025

Dalam bab ini, analisis akan difokuskan pada tiga pilar utama dari *framing* yang dikemukakan oleh Snow dan Benford, yaitu (1) diagnostik, untuk mengidentifikasi akar permasalahan hilirisasi nikel menurut WALHI Sulawesi Tengah, (2) prognostik, untuk menjelaskan strategi dan solusi yang ditawarkan oleh WALHI Sulawesi Tengah, dan (3) motivasi untuk memahami bagaimana WALHI Sulawesi Tengah mendorong solidaritas dalam perkembangan gerakan advokasinya. Ketiga pilar tersebut digunakan untuk memahami secara sistematis bagaimana WALHI Sulawesi Tengah membentuk narasi keadilan ekologis dalam menghadapi isu yang muncul dari hilirisasi nikel di Morowali pada 2020-2025.

Pembingkaian atau *framing* merupakan aliran yang muncul dari suatu cerita atau pemikiran dan mengkomunikasikan sebab terjadinya suatu permasalahan, pihak yang terlibat, serta langkah apa yang harus diambil dari isu tersebut (Nisbet 2010, 15). *Framing* membantu individu dalam mengartikan suatu isu atau kejadian berdasarkan keyakinan budaya dan pandangan dunia yang mereka pahami. Dari perbedaan pemahaman setiap individu, memunculkan respons yang berbeda juga, tergantung pada istilah dan konteks visual yang mereka dapatkan, sehingga terkadang *framing* digunakan untuk menentukan arah atau alternatif sebuah kebijakan. Jadi, *framing* juga dimanfaatkan untuk menyederhanakan suatu isu agar

lebih berpengaruh. Selain itu, jurnalis juga mengaplikasikan *framing* untuk menyusun berita yang menarik perhatian audiens (Nisbet 2010, 16).

Dalam isu perubahan iklim, kelompok observatif biasanya membingkai hal tersebut sebagai isu yang masih diragukan secara ilmiah dan dianggap merugikan secara ekonomi jika ditangani. Disisi lain, kelompok yang mendukung lingkungan akan menekankan ancaman serius dari krisis iklim dengan visualisasi dampak yang muncul seperti badai dan mencairnya es di kutub untuk memunculkan perasaan mendesak di ruang masyarakat (Nisbet 2010, 19). Jika isu tersebut terus berlanjut, akan dihubungkan pada implikasi kesehatan seperti asma dan penyakit menular, sehingga isu iklim terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menantang wacana yang selama ini menjauhkan isu tersebut dari realita yang ada (Nisbet 2010, 22).

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, isu hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah ini tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menunjukkan persaingan antara negara, korporasi, dan organisasi masyarakat sipil dalam wacana dan realita. WALHI Sulawesi Tengah sebagai aktor gerakan lingkungan berupaya untuk melakukan pbingkaian atau *framing* terhadap isu hilirisasi nikel dalam membentuk cara pandang publik mengenai pembangunan ekstraktif dan menegaskan visi yang diterapkan oleh WALHI. Oleh karena itu, teori *framing* yang dikembangkan oleh Snow dan Benford pada 1988 relevan untuk diaplikasikan dalam menganalisis strategi advokasi WALHI dalam memperjuangkan keadilan ekologis di tengah-tengah berlangsungnya hilirisasi nikel.

Teori *framing* digunakan untuk menganalisis sebuah pembingkai dalam suatu gerakan, seperti gerakan sosial dan lingkungan, sehingga *framing* tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membangun persepsi mengenai suatu permasalahan (Benford and Snow 2000, 612). *Framing* merupakan proses yang melibatkan perselisihan dan agensi dalam sebuah konstruksi dan berkembang dari organisasi atau aktivis gerakan yang mungkin menentang sesuatu hal yang sudah ada. Hasil dari *framing* disebut kerangka tindakan kolektif yang berfokus pada mobilisasi penganut potensial, mengumpulkan dukungan pengamat, dan demobilisasi pihak antagonis, sehingga dapat memandu tindakan (Benford and Snow 2000, 614).

3.1 Diagnostik

Dalam konsep *framing* yang dikembangkan oleh Snow dan Benford pada 1988, pilar diagnostik berfungsi untuk mengidentifikasi akar permasalahan, aktor yang dianggap bertanggung jawab, serta dampak yang ditimbulkan dari suatu isu. Melalui pilar ini, WALHI Sulawesi Tengah membingkai persoalan hilirisasi nikel di Morowali sebagai masalah struktural yang lahir dari relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal.

WALHI mengidentifikasi bahwa persoalan hilirisasi nikel berakar pada struktur kebijakan nasional dan investasi asing yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, *framing* diagnostik WALHI Sulawesi Tengah dapat dianalisis melalui tiga faktor yaitu, (3.1.1) aspek struktural, (3.1.2) aspek ekologis dan sosial, dan (3.1.3) aspek ekonomi dan politik.

3.1.1 Aspek Struktural

Indonesia memiliki kekayaan nikel sebanyak 23,7% di dunia, dengan penyebaran dominan di daerah Sulawesi Tenggara sebanyak 32%, Sulawesi Tengah 26%, Maluku Utara 27%. Selain itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel menyebabkan biaya produksi rendah dengan pembangunan PLTU Captive dan dermaga pesisir untuk proses pengiriman batubara. Terlihat dari beberapa Proyek Strategi Nasional (PSN) dan kebijakan nikel pemerintah yang difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi justru memperburuk situasi bagi pekerja, lingkungan, masyarakat lokal, kerusakan ekologis, permasalahan kepemilikan lahan, dan hilangnya nyawa diantara pekerja di industri pengolahan nikel (Katili et al. 2023, 8).

Direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili memaparkan bahwa,

“Dari segi faktor struktural, proyek hilirisasi merupakan bagian dari agenda nasional yang didorong oleh pemerintah sejak era Jokowi sampai Prabowo untuk menambah nilai ekspor sumber daya alam melalui pembangunan *smelter*. Namun, di balik retorika peningkatan nilai tambah, WALHI menilai bahwa kebijakan ini memperkuat penguasaan asing atas sumber daya alam Indonesia. Negara hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah bagi industri negara maju seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, serta menjadi pasar konsumsi bagi produk hasil olahan mereka. Secara tidak langsung, Indonesia diposisikan sebagai pemasok bahan baku dan tenaga kerja murah dalam rantai industri global.” (Katili 2025)

Dalam siaran pers “Menumbalkan Pekerja Demi Keuntungan Semata, Kebobrokan dan Arogansi Modal Tiongkok di Balik Hilirisasi Nikel di Morowali”, WALHI Sulawesi Tengah membingkai dominasi modal Tiongkok di kawasan IMIP sebagai bentuk ketimpangan struktural dalam penguasaan industri nikel. WALHI menyoroti bahwa sejumlah warga Tiongkok menduduki posisi strategis

sebagai pengawas dan supervisor di berbagai fasilitas smelter, termasuk PT ITSS, yang menunjukkan bahwa kendali operasional industri berada di bawah pengaruh asing.

Struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan tambang, menurut WALHI memperlemah kedaulatan ekonomi nasional serta menempatkan pekerja lokal dalam posisi yang rentan. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, sehingga dalam kasus kecelakaan industri, tanggung jawab sering dibebankan pada pekerja, sementara perusahaan jarang dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun telah tersedia regulasi hukum terkait pertanggungjawaban korporasi. PERMA Nomor 13/2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 28/2014 memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

Pada siaran pers, “Hilirisasi Mineral Berujung pada Kerugian dan Kriminalisasi Warga di Morowali,” disebutkan bahwa kebijakan hilirisasi justru menimbulkan bentuk baru dari ketimpangan struktural melalui perampasan tanah, konflik agraria, dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak praktik eksploitasi tersebut, seperti lahan seluas 14 hektar di Desa Ambuna dibuka secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat pada 2024. Jalan desa dialihkan menjadi jalur logistik perusahaan, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) dan Bupati Morowali. WALHI Sulawesi Tengah menilai bahwa praktik tersebut menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan di tingkat lokal mendukung kepentingan korporasi dengan mengorbankan hak-hak masyarakat (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

3.1.2 Aspek Ekologis dan Sosial

Tingginya tingkat penggunaan batubara untuk mengoperasikan pembangkit listrik di kawasan industri nikel, dapat meningkatkan emisi karbon dioksida (CO₂). Berdasarkan perkiraan, penggunaan listrik sebesar 1 MW dari batubara membutuhkan sekitar 4.000 ton batubara per tahun dan dapat menghasilkan abu hitam. Emisi yang dihasilkan dari gas CO₂ sebanyak 57,6 juta ton per tahun, khususnya dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive di wilayah Sulawesi Tengah. Fenomena tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan gas rumah kaca dan pemanasan global yang bertentangan dengan komitmen iklim internasional atau Perjanjian Paris, meskipun saat ini, Pemerintah Indonesia mendorong transisi menuju energi bersih dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik (Katili et al. 2023, 9).

Direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili memaparkan bahwa,

“Ekologis dan sosial, proyek hilirisasi di Morowali menimbulkan berbagai dampak serius. WALHI mencatat adanya kerusakan lingkungan berupa deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi ekosistem pesisir. Penggunaan batubara sebagai sumber energi utama PLTU Captive di kawasan industri menyebabkan peningkatan emisi CO₂ dan pencemaran udara yang berkontribusi pada kasus Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) di sekitar wilayah operasional. Data WALHI tahun 2023, menunjukkan sekitar 1,750 warga di 10 desa mengalami gangguan pernapasan akibat polusi udara. Selain itu, ditemukan pula kandungan *chromium hexavalent* (Cr6) di berbagai titik sungai yang diduga berasal dari limbah industri. Di wilayah pesisir, WALHI menyoroti kerusakan terumbu karang dan mangrove akibat pembuangan limbah panas sekitar 39°C dari proses smelter ke laut yang mengancam kehidupan ikan dan mengurangi hasil tangkapan nelayan. Proyek ini juga memicu konflik lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti dermaga bongkar muat.” (Katili 2025)

Dalam siaran pers, “Bencana Ekologis Jadi Langganan Desa Labota, Morowali,” WALHI mencatat bahwa 53 Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi di Morowali dengan total luas konsesi mencapai 118.139 hektar tersebar di sepanjang daerah pegunungan. Aktivitas tersebut menimbulkan deforestasi dan banjir lumpur di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi. Akibatnya, 200 warga mengungsi dan sejumlah rumah dan fasilitas publik rusak. WALHI Sulawesi Tengah menilai bencana ini bukan sekadar akibat curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena hilangnya daya tampung lingkungan akibat eksploitasi tambang nikel secara masif. Bencana banjir menjadi langganan di daerah sekitar IMIP, karena lemahnya pengawasan negara terhadap regulasi tambang (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

Dalam siaran pers, “Hentikan Upaya Kriminalisasi terhadap Masyarakat Kec. Bungku Barat Kab. Morowali,” menyoroti perampasan tanah dan konflik agraria yang melibatkan PT Huabao Industrial Park (IHIP) dan PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG). Tercatat bahwa proyek pembangunan kawasan industri seluas 20.000 hektar di desa Wata, Tondo, Ambunu, Topogaro, dilakukan tanpa izin lingkungan yang sah dan menyebabkan pengusuran lahan produktif masyarakat.

Reklamasi pantai seluas 40 hektar di Desa Tondo dan Ambunu menyebabkan 115 nelayan rumput laut kehilangan mata pencaharian. WALHI juga menemukan 170 hektar sawah di Desa Topogaro menjadi tidak produktif, akibat penimbunan irigasi oleh perusahaan, serta 14 hektar lahan sawit rakyat dirampas secara paksa dengan alasan salah gusur. Kondisi itu semakin parah ketika masyarakat melakukan aksi blokade terhadap jalan tani yang digunakan untuk jalur

tambang, namun justru dikriminalisasi melalui pelaporan yang diajukan ke kepolisian. WALHI menilai situasi tersebut sebagai bentuk ketimpangan sosial dan politik yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih berpihak pada korporasi dibandingkan dengan masyarakat yang terdampak (WALHI 2024).

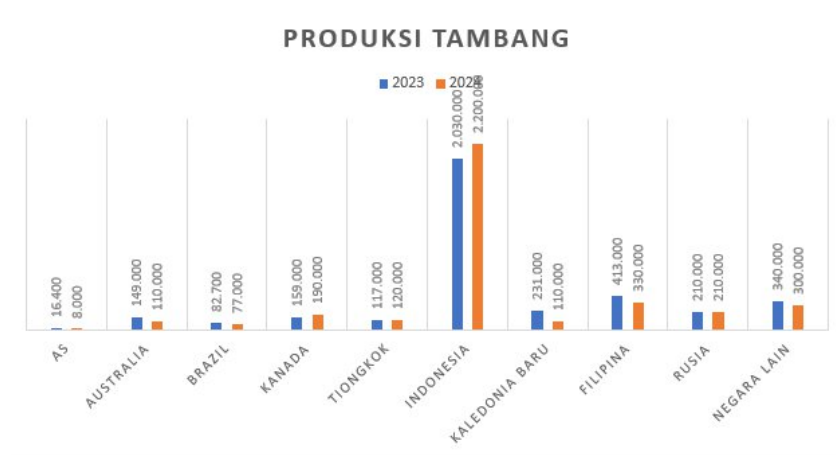
3.1.3 Aspek Ekonomi dan Politik

Dalam siaran pers WALHI Sulawesi Tengah, Aulia Hakim menegaskan bahwa klaim pemerintah mengenai manfaat ekonomi hilirisasi, khususnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, secara umum tidak dirasakan oleh masyarakat di Morowali. Aulia Hakim menyebutkan bahwa pekerja menghadapi upah yang rendah, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, serta risiko kesehatan serius akibat polusi udara, sehingga lebih dari separuh warga setempat diperkirakan terkena Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) (WALHI Sulawesi Tengah, 2023). WALHI menekankan bahwa biaya sosial, mulai dari banjir yang merendam pemukiman karyawan sampai meningkatnya kerentanan ekonomi, justru lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan.

Dalam laporan WALHI berjudul “Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar,” berfokus pada strategi pemerintah sebagai upaya berburu investasi tetapi menuai bencana. WALHI menilai bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis industri nikel membuat negara bergantung pada hutang izin ekstraktif dan investasi asing. Perusahaan Tiongkok mendominasi rantai pasok hilirisasi dan mengakibatkan ketergantungan baru dalam model pembangunan nasional. Meskipun pemerintah menonjolkan keberhasilan hilirisasi melalui peningkatan nilai ekspor dan penyerapan tenaga kerja, WALHI menemukan bahwa manfaat lokal hilirisasi sangat terbatas. WALHI membingkai hilirisasi nikel sebagai proyek

yang menempatkan masyarakat sebagai pihak paling rentan dalam hubungan antara negara, korporasi, dan investasi asing (Kurniawan et al. 2025, 57-58).

Grafik 1. Produksi Komoditas Mineral



Sumber: U.S. Geological Survey 2025

Produksi nikel global diperkirakan turun pada tahun 2024, Indonesia justru mengalami peningkatan produksi sekitar 8%. Kenaikan suplai dari Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang memperpanjang surplus nikel di pasar global, yang kemudian turut menekan harga rata-rata London Metal Exchange (LME) *nickel cash price* sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Pada awal 2024, terjadi kenaikan harga akibat kekhawatiran terkait penutupan aset nikel dan keterlambatan penerbitan kuota penambangan baru di Indonesia, tetapi kekhawatiran tersebut mereda pada pertengahan tahun, sehingga harga kembali turun (Stewart and United States Geological Survey 2025).

Perusahaan memberikan klaim kontribusi ekonomi besar melalui hilirisasi, mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah dengan cara Indonesia menyumbang sekitar 50% produksi nikel dunia pada 2023 (Hasan and Hummer 2024, 19). Sebaliknya, WALHI menemukan fakta bahwa hilirisasi industri nikel

justru didorong oleh PLTU Captive berbahan bakar batubara yang menghasilkan emisi karbon tinggi, sehingga angka emisi nikel di Indonesia mencapai 22% lebih tinggi dari rata-rata global (Hasan and Hummer 2024, 33). WALHI menyoroti adanya potensi risiko kerugian ekonomi akibat PLTU batubara, rendahnya transparansi *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hasilnya, korporasi membingkai hilirisasi nikel sebagai proyek hijau dan strategis secara ekonomi (Hasan and Hummer 2024, 29).

Direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili memaparkan bahwa,

“Pada bidang ekonomi dan politik, WALHI memandang proyek hilirisasi merupakan bagian dari agenda nasional yang akses dari model pembangunan ekstraktif berorientasi pada investasi asing. Secara tidak langsung, Indonesia terjebak dalam posisi subordinat sebagai penyedia bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar industri global.” (Katili 2025).

Tabel 5. Framing Diagnostik WALHI Sulawesi Tengah

Akar masalah	Aktor yang dianggap bertanggung jawab	Dampak yang dibingkai
Ketimpangan struktural	Pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi nikel (IMIP, Tsingshan Group)	Dominasi modal asing, lemahnya regulasi korporasi
Ekologis dan sosial	Perusahaan smelter, PLTU Captive	Deforestasi, banjir, pencemaran udara, air, krisis kesehatan masyarakat, konflik agraria, kriminalisasi warga
Ekonomi dan politik	Negara dan korporasi industri nikel	Upah rendah, kesejahteraan lokal terpinggirkan

Sumber: WALHI Sulawesi Tengah

Melalui diagnostik, WALHI Sulawesi Tengah mbingkai isu sebagai hasil yang muncul dari persoalan struktural, ekologis, sosial, ekonomi, dan politik yang didukung oleh investasi asing untuk pembangunan ekstraktif, terutama perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Group dan kawasan IMIP. Ketimpangan negara, pemerintah daerah, dan korporasi memperparah dampak yang ditimbulkan, seperti lemahnya regulasi tambang, pengawasan, dan kelalaian terhadap pelanggaran korporasi.

3.2 Prognostik

Pembahasan sebelumnya membahas bagaimana WALHI Sulawesi Tengah memetakan kerangka masalah melalui diagnostik mengenai hilirisasi nikel, sehingga pada prognostik akan menelaah bagaimana WALHI merumuskan gagasan solusi dan strategi advokasi. Prognostik menjadi kerangka penting untuk mendalami proses WALHI Sulawesi Tengah dalam menawarkan alternatif solusi dan tindakan kolektif terhadap persoalan pembangunan ekstraktif yang terus berlangsung sampai saat ini. Dalam pembahasan ini, WALHI Sulawesi Tengah mbingkai dua solusi, yaitu (3.2.1) moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap PLTU Captive dan (3.2.2) transisi energi yang bertujuan untuk keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

3.2.1 Moratorium dan Evaluasi PLTU Captive

Hilirisasi nikel di Morowali adalah isu yang disorot oleh WALHI Sulawesi Tengah, akibat ketergantungan industri pada PLTU Captive berbahan bakar batubara. Oleh karena itu, langkah prognostik pertama yang dirumuskan oleh WALHI Sulawesi Tengah berfokus pada penghentian sementara aktivitas industri

energi fosil dan mengadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasi PLTU dalam kawasan industri nikel. Pendekatan ini menjadi dasar dari strategi advokasi WALHI Sulawesi Tengah, yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian berikut.

Kegiatan dialog multi pihak yang menghadirkan narasumber Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, Sukyanti ST.,M.Si, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah Fadli, S.Hut, dan Direktur WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, S.H. dilaksanakan pada 1 Desember 2023 di Rumah Gerakan WALHI Sulteng Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa pembangunan PLTU Captive di kawasan industri nikel menghasilkan kerusakan lingkungan, deforestasi, hilangnya ruang hidup masyarakat sampai pencemaran udara yang semakin meningkat. Kondisi tersebut semakin buruk karena lemahnya penegakan regulasi dan minimnya kewenangan lembaga daerah dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar. WALHI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pembangunan PLTU Captive baru perlu dihentikan agar pemerintah dapat melakukan audit lingkungan atas kerusakan pesisir dan laut, serta memastikan perlindungan terhadap wilayah lingkaran tambang (WALHI Sulawesi Tengah 2023).

WALHI Sulawesi Tengah semakin kritis setelah insiden kebakaran PLTU Captive di kawasan PT IMIP pada Juni 2023. Insiden tersebut terjadi karena lemahnya keamanan operasional dan tingginya risiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. WALHI Sulawesi Tengah mencatat bahwa ketergantungan industri terhadap energi batubara merupakan pemikiran sesat yang berpotensi mengancam keselamatan rakyat, terutama karena PLTU Captive di kawasan industri tetap mendapat izin meskipun kebijakan nasional tengah mendorong

penghapusan PLTU batubara secara bertahap. Selain risiko terhadap kebakaran dan ledakan, limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kualitas udara, serta penurunan pendapatan nelayan akibat pencemaran laut (WALHI Sulawesi Tengah 2023).

Direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili memaparkan bahwa,

“WALHI Sulawesi Tengah menilai bahwa solusi utama atas persoalan proyek hilirisasi nikel di Morowali terletak pada tanggung jawab pemerintah, baik pusat atau daerah. WALHI juga mengusulkan adanya moratorium (penghentian sementara) terhadap operasi PLTU batubara dan pembangunan smelter baru di kawasan industri nikel, tujuannya agar pemerintah dapat melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial yang sudah terjadi. Selama masa moratorium, pihak WALHI mendorong transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, seperti PLTA, PLTS, tenaga bayu, bahkan nuklir, kami juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan hak bagi masyarakat yang terdampak. Meskipun terdapat kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, yang menargetkan penghentian PLTU batubara secara bertahap sampai 2050, kami menilai implementasinya belum menjawab masalah nyata yang terjadi saat ini, sehingga penghentian sementara dan evaluasi segera dianggap sebagai langkah paling mendesak.” (Katili 2025).

Dengan demikian, rekomendasi moratorium dan evaluasi PLTU Captive menjadi konsekuensi logis dari kerangka prognostik WALHI Sulawesi Tengah. Strategi ini bukan hanya bentuk penolakan terhadap ekspansi energi kotor di kawasan industri nikel, tetapi juga landasan bagi transisi energi yang lebih adil.

3.2.2 Transisi Energi

Akibat pembangunan ekstraktif yang dijalankan melalui hilirisasi nikel, WALHI Sulawesi Tengah memandang perlunya solusi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam pilar prognostik

adalah transisi energi hijau. Transisi energi ini diposisikan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batubara, yang selama ini menjadi sumber utama energi bagi industri smelter nikel di Morowali.

Inisiatif transisi energi di Indonesia memerlukan transisi yang adil *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yakni proses peralihan energi yang tidak menimbulkan beban sosial baru bagi masyarakat dan pekerja. Namun, dalam praktiknya, transisi energi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Ketergantungan terhadap batubara sebagai tulang punggung ekonomi energi nasional memunculkan persoalan seperti kebutuhan modal yang besar, potensi kehilangan pekerjaan di sektor energi fosil, serta risiko berkurangnya pendapatan negara. Dalam konteks ini, *Just Energy Transition Partnership* (JETP) Indonesia mengakui pentingnya perlindungan bagi kelompok terdampak, khususnya pekerja sektor batubara, agar peralihan menuju energi terbarukan tidak menciptakan kerentanan sosial baru (Resosudarmo, Rezki, and Effendi 2023, 169).

Pemerintah Indonesia juga memperkuat kerangka kebijakan dan pembiayaan, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mendorong pengembangan energi terbarukan dan pembatasan pembangunan PLTU baru, terutama terkait pendanaan dan fleksibilitas harga listrik (Resosudarmo, Rezki, and Effendi 2023, 162).

Dari sudut pandang peneliti, kerangka kebijakan transisi energi masih menyisakan kontradiksi, terutama ketika dihadapkan dengan realitas hilirisasi nikel yang justru bergantung pada ekspansi PLTU Captive. Secara perencanaan memang mendorong pengurangan emisi, tetapi justru hilirisasi memperluas penggunaan energi fosil dalam skala besar, sehingga melemahkan komitmen transisi energi

yang selama ini diklaim oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, transisi energi yang berjalan bersamaan dengan industri nikel berisiko menjadi transisi yang tidak maksimal, karena tidak menyentuh akar persoalan ketergantungan energi fosil.

Transisi energi yang adil dengan menuntut kampanye publik yang efektif dan bekerja sama dengan lintas aktor untuk membangun solidaritas serta aksi kolektif antar wilayah. Prinsip utamanya adalah proses negosiasi berbasis dialog sosial antara pemerintah, industri, pekerja, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya pekerjaan yang layak, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Meskipun, penerapan praktik dialog sosial yang bersifat formal di Indonesia mengenai transisi energi masih terbatas. Forum yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja belum terorganisasi dengan baik untuk membahas penghapusan batubara, meskipun serikat pekerja mendorong pembentukan struktur pihak yang bersangkutan tersebut dan beberapa kementerian serta asosiasi pengusaha terlibat, mekanisme ini belum dilembagakan secara efektif (Christensen and Suharsono 2022, 2).

WALHI Sulawesi Tengah, mengaitkan gagasan transisi energi berkeadilan dengan kritik terhadap hilirisasi nikel yang bergantung pada PLTU Captive. Dalam siaran pers berjudul, “Ambisi Hilirisasi Nikel dan Masifnya Penggunaan Energi Fosil Batubara di Sulawesi Tengah”, WALHI menegaskan bahwa proyek hilirisasi yang digerakkan oleh investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Group, Jiangsu Delong Group, Shenzi Group, dan IHIP menciptakan ketergantungan yang besar terhadap energi batubara. WALHI Sulawesi Tengah mencatat bahwa hampir seluruh smelter di Morowali dan Morowali Utara

menggunakan teknologi *Rotary Kiln-Electric Furnace* (RKEF) yang memerlukan energi dalam jumlah besar, sehingga mendorong pembangunan PLTU Captive dengan kapasitas yang terus meningkat diperkirakan mencapai 8,345 MW pada 2027-2028.

WALHI berpendapat bahwa PLTU Captive tidak hanya bertentangan dengan komitmen penurunan emisi dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, tetapi juga menghasilkan dampak ekologis dan kesehatan. WALHI menunjukkan bahwa masyarakat di delapan desa lingkaran industri mengalami pencemaran udara, penurunan pendapatan nelayan, gangguan kesehatan seperti ISPA, penyakit kulit, serta degradasi pesisir akibat pembuangan limbah panas dari PLTU. WALHI menilai bahwa kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan ekologis, yang membuat beban sosial dan lingkungan justru ditanggung oleh masyarakat lokal, sementara manfaat ekonomi lebih banyak mengalir ke industri dan investor (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

Peneliti menilai bahwa solusi transisi energi yang ditawarkan WALHI Sulawesi Tengah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis. Seruan moratorium dan evaluasi PLTU Captive merupakan upaya untuk menentang struktur pembangunan yang menggunakan energi fosil demi kepentingan industri ekstraktif. Dengan demikian, transisi energi dalam *framing* WALHI tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap model pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi asing dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Dalam pilar prognostik ini, WALHI Sulawesi Tengah menganggap moratorium dan evaluasi PLTU Captive yang diposisikan sebagai upaya untuk menghentikan sumber kerusakan dan transisi energi menawarkan arah

pembangunan alternatif yang tetap mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu, WALHI Sulawesi Tengah tidak hanya menolak ekspansi energi fosil, tetapi juga menawarkan model pembangunan yang lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya.

3.3 Motivasi

Dalam pilar motivasi, WALHI Sulawesi Tengah membangun dorongan moral dan urgensi tindakan melalui narasi tentang penderitaan warga serta kegagalan negara dan perusahaan dalam melindungi keselamatan masyarakat. Serangkaian siaran pers WALHI Sulawesi Tengah menunjukkan bagaimana organisasi ini menjelaskan bahwa masyarakat tidak boleh pasif dalam menghadapi kerusakan ekologis yang terus berulang akibat hilirisasi nikel.

Aksi pada 22 Juli 2024, yang sebelumnya diadakan pada 18-19 Juli 2024 di Jetty PT IMIP merupakan serangkaian unjuk rasa atas kemarahan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas nikel di IMIP. Masyarakat Desa Labota yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Desa Labota Sadar Lingkungan (GMDLSL) dan WALHI Sulawesi Tengah yang menekankan bahwa setiap hari warga hidup dalam polusi abu batubara PLTU Captive, kebisingan conveyor, pencemaran laut, serta ancaman kesehatan yang dialami anak-anak akibat tinggal berdekatan dengan 20 PLTU Captive milik PT IMIP. Kondisi tersebut, membuat WALHI Sulawesi Tengah membingkai bahwa diam berarti membiarkan ketidakadilan struktural untuk terus berlangsung, terlebih dengan warga yang menyebutkan “hampir 10 tahun dijanji kompensasi tanpa hasil” (WALHI 2024).

Hal yang serupa terjadi, yakni banjir berulang di Morowali, kejadian tersebut dipaparkan dalam siaran pers pada Maret 2025 dan munculnya krisis air bersih di Morowali Utara pada September 2025. WALHI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa bencana dan pencemaran bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari izin tambang yang masih lemah dan kurangnya pengawasan dari negara. Narasi tentang kisah warga yang harus membeli air, anak-anak yang terus terkena ISPA, dan perempuan yang terdampak akibat pencemaran air, WALHI Sulawesi Tengah menciptakan *call of action* berbasis empati dan keadilan ekologis, seperti mendesak masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk terus menuntut evaluasi secara menyeluruh, melakukan audit lingkungan, dan moratorium aktivitas tambang. Strategi tersebut membuat WALHI Sulawesi Tengah memobilisasi solidaritas antara berbagai komunitas dengan menekankan bahwa perubahan hanya dapat terjadi jika masyarakat secara kolektif mengambil posisi menolak model pembangunan yang merugikan mereka (WALHI Sulawesi Tengah 2024).

Dalam pilar motivasi ini difokuskan pada proses membangun kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan isu lingkungan yang merupakan upaya dalam membela hak atas kehidupan dan ruang ekologis dan bertujuan untuk menumbuhkan aksi kolektif serta narasi advokasi di bidang pertambangan, khususnya di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya keberlanjutan di wilayah pertambangan menghadapi hambatan besar akibat degradasi lingkungan, konflik lahan, dan tata kelola kelembagaan yang terfragmentasi, dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah. Status tanah yang tidak jelas, kompensasi tertunda, serta batas wilayah yang diperebutkan seringkali memicu konflik kecil sampai membesar,

sementara desentralisasi justru memperlebar kesenjangan tata kelola (Siahaan et al. 2025, 12). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pertambangan memerlukan transparansi dan pengambilan keputusan secara partisipatif, karena perubahan tanpa dukungan yang benar-benar diterapkan bisa jadi hanya sebatas formalitas (Siahaan et al. 2025, 13). Selain itu, pendekatan *top-down* yang mendominasi sering menyingkirkan lembaga lokal dan mengabaikan lingkup sosial dan masyarakat yang semakin terdampak, sehingga proyek pembangunan berpotensi kehilangan dukungan secara sosial (Siahaan et al. 2025, 21).

Menurut hasil wawancara dengan direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili menyampaikan, bahwa:

“Kami mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan advokasi hilirisasi nikel secara aktif di Morowali dengan membentuk dan bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal, termasuk serikat pekerja dan kelompok masyarakat di sekitar tambang. Kami melibatkan warga melalui diskusi di kampung-kampung, forum terbuka, sampai pendampingan advokasi hukum yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Selain itu, masyarakat juga difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah daerah bahkan sampai mengajukan gugatan hukum atas kerugian yang mereka alami.” (Katili 2025).

Isu lingkungan dan sosial yang terjadi akibat hilirisasi nikel membuat organisasi masyarakat sipil seperti WALHI memainkan peran penting dalam membingkai sebuah narasi untuk memaparkan ke publik, tetapi seringkali bertentangan dengan perspektif pemerintah, sehingga perlu menekankan transparansi, keterlibatan publik, dan keadilan ekologis. Aktivis yang terlibat dalam organisasi masyarakat sipil, secara konsisten mengangkat isu-isu lingkungan dan sosial permasalahan yang muncul dari hilirisasi melalui media. Peningkatan tersebut meliputi keterbukaan informasi dan masukan publik untuk pembuat kebijakan, khususnya pada pemangku kepentingan.

Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai pintu gerbang untuk memperluas ruang bagi penyusunan regulasi dan membatasi ruang lingkup pemerintah yang mendominasi, sehingga kebijakan yang dibuat tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan pemerintah, tetapi juga mencerminkan keprihatinan masyarakat yang lebih luas. Dengan mendorong keterbukaan informasi serta memperluas peran masyarakat sipil menjadi pintu masuk untuk mempengaruhi arah kebijakan di sektor energi, sehingga upaya advokasi yang dilakukan ini dapat berlangsung secara adil, sejalan dengan prinsip keadilan ekologis, dan tetap menghormati terhadap hak-hak masyarakat di tingkat lokal (Cahyadi, Adiwibowo, and Hartulistiyoso 2025, 4969) .

Mengutip dari hasil wawancara dengan Direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili menyatakan, bahwa:

“WALHI Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan banyak organisasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam proses advokasi terkait hilirisasi nikel. Di tingkat lokal, WALHI Sulawesi Tengah bekerja sama dengan beberapa LSM, seperti Yayasan Tanah Merdeka dan organisasi masyarakat di wilayah lingkaran tambang. Di tingkat nasional, kolaborasi dilakukan dengan WALHI nasional serta jejaring LSM lainnya, seperti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Yayasan Shabat Morowali (YSM) dan Greenpeace. Selain itu, di tingkat internasional, WALHI juga menjalin kerja sama dengan organisasi dari Taiwan, yaitu Informental Rights, karena ada keterkaitan dengan investasi Taiwan di kawasan industri tersebut. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat advokasi terhadap dampak hilirisasi nikel dan industri nikel di Morowali.” (Katili 2025).

Dalam mempertahankan kegiatan advokasi yang konsisten dalam isu-isu lingkungan dan sosial di lingkup pertambangan di Indonesia, menghadapi tantangan internal dan eksternal yang seringkali terjadi perpecahan dalam mengelola sebuah permasalahan, penurunan rasa kepercayaan terhadap pemangku kepentingan, munculnya hambatan dalam memadukan upaya dengan kebijakan dan realita yang ada, ketidakjelasan hukum, serta lemahnya koordinasi di tingkat

pemerintah daerah. Keberlanjutan tersebut menghambat wewenang perusahaan dan berpotensi untuk memperlebar kesenjangan tata kelola dengan kebijakan desentralisasi, sehingga permintaan mengalami tumpah tindih dan peraturan yang ditetapkan, bertentangan dengan kehutanan, pertambangan, dan otoritas pembangunan daerah yang tidak satu suara (Siahaan et al. 2025, 8).

Menurut hasil wawancara dengan Direktur WALHI Sulawesi Tengah periode 2021-2025, Sunardi Katili menyatakan, bahwa:

“Tantangan yang dihadapi oleh WALHI Sulawesi Tengah berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, sehingga anggota yang harus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan isu masih jauh dari kata cukup, sementara dinamika hilirisasi nikel semakin cepat dan kompleks. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai soliditas internal dalam menjaga kesinambungan advokasi. Disisi lain, tantangan eksternalnya datang dari konteks regulasi. Kebijakan pemerintah pusat yang masih membuka ruang besar bagi penggunaan batubara, termasuk pasokan batubara dari Kalimantan ke kawasan industri di Sulawesi Tengah juga menjadi hambatan untuk mendorong penghentian batubara dan transisi energi. Penggunaan batubara di PLTU kawasan industri cenderung lebih mudah dan praktis secara regulasi dibandingkan alternatif energi lainnya, sehingga upaya advokasi pengurangan batubara menjadi lebih sulit. Untuk menjaga konsistensi advokasi, kami menekankan pentingnya solidaritas dan kekompakan internal, tidak hanya di level Sulawesi Tengah, tetapi dalam skala regional Sulawesi sampai Maluku, terutama Maluku Utara. Mengingat isu ini berada dalam skema Proyek Strategi Nasional (PSN) dan terhubung dengan kepentingan internasional, konsistensi gerakan membutuhkan kekuatan kolektif lintas wilayah.” (Katili 2025).

Dengan demikian, pilar motivasi ini menunjukkan bahwa WALHI Sulawesi Tengah tidak hanya melakukan kritik dan unjuk rasa, tetapi juga membangun hubungan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati, keadilan ekologis, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap aktif dalam menyuarakan ketidakadilan serta menolak model pembangunan yang merugikan masyarakat sekitarnya.

Penting untuk menilai sejauh mana upaya *framing* yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Tengah mencapai tujuan advokasinya. Berdasarkan analisis terhadap tiga pilar framing Snow dan Benford, yaitu diagnostik, prognostik, dan motivasi, dapat disimpulkan bahwa framing WALHI Sulawesi Tengah tidak secara langsung menghasilkan perubahan kebijakan struktural dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun investor. Namun demikian, *framing* tersebut berhasil menciptakan dampak signifikan pada tingkat wacana, kesadaran publik, dan tekanan politik terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proyek hilirisasi nikel di Morowali.

Melalui *framing* diagnostik, WALHI Sulawesi Tengah berhasil membingkai hilirisasi nikel bukan semata sebagai proyek pembangunan ekonomi dan transisi energi, melainkan sebagai sumber persoalan struktural yang menimbulkan ketimpangan ekologis dan sosial. WALHI konsisten mengidentifikasi aktor yang dianggap bertanggung jawab, yaitu perusahaan pengelola kawasan industri nikel serta pemerintah sebagai pembuat dan pengawas kebijakan. *Framing* ini berkontribusi pada perubahan cara pandang publik terhadap hilirisasi nikel, dengan menyoroti kesenjangan antara narasi pembangunan nasional dan realitas yang dialami masyarakat lokal. Meskipun belum menghasilkan pencabutan izin atau perubahan regulasi secara langsung, *framing* diagnostik ini berhasil melemahkan legitimasi klaim pemerintah dan korporasi bahwa hilirisasi nikel merupakan proyek yang sepenuhnya berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam pilar prognostik, WALHI Sulawesi Tengah menawarkan berbagai solusi, seperti audit lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan, moratorium ekspansi smelter dan PLTU Captive, serta dorongan

menuju transisi energi. Solusi-solusi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun, *framing* prognostik WALHI berfungsi sebagai alat kritik dalam perdebatan masyarakat mengenai arah pembangunan nasional dan membuka ruang diskusi mengenai keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tata kelola sumber daya alam. Dengan demikian, keberhasilan *framing* prognostik lebih terlihat pada kemampuan WALHI dalam membangun narasi daripada menghasilkan kebijakan yang sesuai dalam jangka pendek.

Framing motivasi menunjukkan dampak yang relatif lebih nyata dalam bentuk mobilisasi sosial. Melalui narasi penderitaan warga, ancaman terhadap lingkungan, dan urgensi moral untuk bertindak, WALHI Sulawesi Tengah berhasil mendorong keterlibatan masyarakat terdampak, memperkuat solidaritas antar organisasi masyarakat sipil, serta memicu aksi kolektif seperti kampanye publik, diskusi, dan demonstrasi. Meskipun upaya tersebut belum mampu memaksa perubahan kebijakan negara atau keputusan investasi industri nikel, *framing* motivasi berhasil membangun dukungan masyarakat yang menjadi dasar penting bagi advokasi lingkungan jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan *framing* WALHI Sulawesi Tengah memberikan pengaruh, tetapi belum sepenuhnya berhasil. *Framing* yang dilakukan efektif dalam membangun kesadaran publik, dan melemahkan legitimasi aktor-aktor yang dihadapi, namun belum mampu menghasilkan perubahan struktural secara langsung. Temuan ini menegaskan bahwa *framing* dalam gerakan lingkungan berperan sebagai strategi politik wacana yang penting untuk menantang relasi kuasa antara negara, korporasi, dan

masyarakat, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kuatnya kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan dalam proyek hilirisasi nikel di Morowali.

BAB IV

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana WALHI Sulawesi Tengah membingkai persoalan hilirisasi nikel di Morowali pada tahun 2020-2025 melalui teori *framing* Snow dan Benford (1988), yang meliputi diagnostik, prognostik, dan motivasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis wacana dan wawancara mendalam, kemudian melihat bagaimana *framing* tersebut dibangun, disusun, dan disebarakan ke publik sebagai bagian dari strategi advokasi lingkungan.

Dari hasil penelitian, ditunjukkan bahwa WALHI Sulawesi Tengah mengartikan hilirisasi nikel bukan sekadar aktivitas industri, tetapi juga sebagai pemicu dari permasalahan struktural, terutama model pembangunan berbasis investasi asing dan masuknya perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Group melalui IMIP. WALHI Sulawesi Tengah menyoroti kerusakan lingkungan, kehilangan ruang hidup yang layak, ketergantungan ekonomi, serta lemahnya kontrol pemerintah daerah sebagai dampak utama yang muncul.

Dalam menawarkan solusi, WALHI Sulawesi Tengah melakukan seruan untuk audit lingkungan, penegakan hukum atas pelanggaran perusahaan, penataan ulang tata kelola perizinan, dan moratorium ekspansi industri nikel. WALHI Sulawesi Tengah juga menawarkan solusi pembangunan berkelanjutan, pemulihan ekologis, dan pemberdayaan ulang ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diperkuat melalui kampanye publik, kerja sama advokasi kebijakan, serta mobilisasi media, dan komunitas yang terdampak.

Dalam motivasi, WALHI Sulawesi Tengah membangun dorongan moral dan urgensi tindakan dengan menonjolkan narasi kisah warga yang terdampak polusi, bencana ekologis, maupun ketidakpastian ekonomi. Narasi penderitaan tersebut digunakan untuk menciptakan solidaritas dan memobilisasi aksi kolektif, baik di tingkat komunitas atau nasional. WALHI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa perubahan hanya dapat dicapai jika masyarakat tidak menormalisasi kerusakan ekologis dan menuntut pertanggungjawaban negara dan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anditya, Chrisnawan. 2024. "Buka Indonesia Mining Summit, Menteri Bahlil Tegaskan Lagi Arahan Presiden untuk Hilirisasi." Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/buka-indonesia-mining-summit-menteri-bahlil-tegaskan-lagi-arahan-presiden-untuk-hilirisasi>.
- Benford, Robert D., and David A. Snow. 2000. *FRAM*
- Benford, Robert D., and David A. Snow. 2000. *FRAMING PROCESSES AND SOCIAL MOVEMENTS: An Overview and Assessment*, 611-633. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. N.p.: OUP Oxford. <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/social-research-methods-alan-bryman.pdf>.
- Cahyadi, Firdaus, Soeryo Adiwibowo, and Edy Hartulistiyoso. 2025. *Media Discourse Contestation on Indonesia's Energy Transition Policy: Network and Structural Analysis* 6 (6): 4969. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Christensen, Lasse T., and Anissa Suharsono. 2022. *Achieving a Just Energy Transition in Indonesia*, (Juli), 2.
- Daly, Tom, and Min Zhang. 2021. "Tsingshan targets 2 GW clean power base for Indonesia battery materials." <https://www.zawya.com/en/business/tsingshan-targets-2-gw-clean-power-base-for-indonesia-battery-materials-ufx07m8g>.
- Harefa, Wardah H. 2021. *Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan* 1, no. 4 (Desember): 1-13. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/892>.
- Hasan, Katherine, and Lucy Hummer. 2024. *Pembangkit batubara captive Indonesia terus melonjak Kapasitas naik tiga kali lipat dalam lima tahun picu beban kesehatan publik mencapai USD 20 miliar*, (November), 19.
- Kalmirah, Julia, Dody Prayogo, and Ricardi Adnan. 2024. *The Future of The Environmental Movement in Indonesia: Case Study of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI (1980-2020)* 06 (November): 5421. [10.47191/ijmra/v6-i11-55](https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i11-55).
- Katili, Sunardi. 2025. *Wawancara Data Primer*. Zoom Meeting, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta: WALHI Sulawesi Tengah.
- Katili, Sunardi, Yusman, Bonar A. Barau, and Aulia Hakim. 2023. *CATAHU 2023 PSN BAHAYA TERPENDAM BAGI BURUH, EKOLOGI DAN KEHIDUPAN RAKYAT DI KAWASAN IDNUSTRI NIKEL WALHI: DORONG EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PERUSAHAAN*, (Desember), 8.
- Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia. n.d. "Untitled." ESDM. Accessed December 8, 2025. <https://www.esdm.go.id/assets/booklet/tambang-2020/Booklet-Nikel-FA.pdf>.

- Khaldun, Riady I. 2024. "Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia." 20, no. 1 (Januari): 153-165.
<https://jurnal.itsm.ac.id/index.php/relasi/article/view/973>.
- Kurniawan, Adam, Fanny T. Christanto, Ferry Widodo, Mukri Friatna, Malva Harahap, Satrio Manggala, Tubagus S. Ahmadi, and Uli A. Siagian. 2025. *MELANJUTKAN TERSESAT, ATAU KEMBALI KE JALAN YANG BENAR UNTUK KEDAULATAN BANGSA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LEBIH BAIK*, 57-58.
- Medina, Ayman F. 2025. "Investing in Indonesia's Nickel Industry." ASEAN Briefing. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-nickel-downstreaming-policy-opportunities-and-challenges-for-investors>.
- Musni, Yudhi R. 2024. "Bagaimana awal mula berdirinya Kawasan Industri IMIP? - PT Indonesia Morowali Industrial Park." Indonesia Morowali Industrial Park. https://imip.co.id/helpie_faq/pertanyaan-baru/.
- Myllyvirta, Lauri, Katherine Hasan, Jamie Kelly, Jobit Parapat, Bhima Y. Adhinegara, Atina Rizqiana, Fiorentina Refani, et al. 2024. "CREA_CELIOS - Indonesia Nickel Development_ID." (February), 61. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/02/CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development_ID.pdf.
- Neuman, William L. 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. N.p.: Pearson.
- Nisbet, Matthew C. 2010. *Communicating Climate Change: Why Frames Matter for Public Engagement*, (Agustus), 15. <http://dx.doi.org/10.3200/ENVT.51.2.12-23>.
- Paradise, Muhammad A., and Sahrudin Lubis. 2025. *Peran WALHI Jakarta sebagai Civil Society Organization dalam Dinamika Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta* 46 (1). <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4036>.
- Pribadi, Agung. 2020. "Hilirisasi Nikel Demi Nilai Tambah Bangsa Indonesia." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-demi-nilai-tambah-bangsa-indonesia>.
- Pribadi, Agung. 2020. "Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi." Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>.
- Putri, Sahvina T., Doris Febriyanti, and Sanny Nofrima. 2024. *Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir 2023* 5, no. 5 (Oktober): 9974-9983.
- Resosudarmo, Budy P., Jahen F. Rezki, and Yuventus Effendi. 2023. "Prospects of Energy Transition in Indonesia." 59 (2): 169. <https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/00074918.2023.2238336>.
- Sangadji, Arianto, Pius Ginting, and Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER). 2023. *Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Hilirisasi Nikel di Indonesia*, (September), 8.

Siahaan, Justan R., Gagaring Pagalung, Eymal B. Demmallino, Abrar Saleng, Andi A. Sulaiman, and Nadhirah Nagu. 2025. *Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes: A Foundational Framework for Institutional and Behavioral Integration in Indonesia* 5278, no. 17 (Juni): 12. <https://doi.org/10.3390/su17125278>.

Situmorang, Berlin S. 2025. "Industri Nikel Indonesia di Persimpangan Geopolitik Global." <https://iism.or.id/2025/04/30/industri-nikel-indonesia-di-persimpangan-geopolitik-global/>.

Stewart, Andrew A., and United States Geological Survey. 2025. "Mineral Commodity Summaries." <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-nickel.pdf>.

WALHI. 2023. "Tungku Smelter PT ITSS di IMIP Morowali Meledak, Walhi Sulteng: Hentikan Produksi PT IMIP, Pekerja Bukan Tumbal Modal Semata." WALHI. <https://www.walhi.or.id/tungku-smelter-pt-itss-di-imip-morowali-meledak-walhi-sulteng-hentikan-produksi-pt-imip-pekerja-bukan-tumbal-modal-semata>.

WALHI. 2024. "Hentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Kec. Bungku Barat Kab. Morowali – Sulawesi Tengah Korban Industri Nikel." <https://www.walhi.or.id/hentikan-upaya-kriminalisasi-terhadap-masyarakat-kec-bungku-barat-kab-morowali-sulawesi-tengah-korban-industri-nikel>.

WALHI. 2024. "WALHI Sulteng Mendukung aksi masyarakat Desa Labota yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (GMDLSL)." <https://www.walhi.or.id/walhi-sulteng-mendukung-aksi-masyarakat-desa-labota-yang-tergabung-dalam-aliansi-gerakan-masyarakat-sadar-lingkungan-gmdsls>.

WALHI. n.d. "Visi dan Misi." WALHI. Accessed Juni 2, 2025. <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2023. "Walhi Sulteng Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulteng Hentikan Aktivitas PLTU Captive di Kawasan Industri Hilirisasi Nikel Morowali Utara dan Morowali." <https://www.walhi.or.id/walhi-sulteng-desak-pemerintah-pusat-dan-provinsi-sulteng-hentikan-aktivitas-pltu-captive-di-kawasan-industri-hilirisasi-nikel-morowali-utara-dan-morowali>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2023. "PLTU CAPTIVE : Sumber Masalah Sosial dan Ekonomi Rakyat, Serta Kejahatan Lingkungan." <https://walhisulteng.org/pltu-captive-sumber-masalah-sosial-dan-ekonomi-rakyat-serta-kejahatan-lingkungan/>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2024. "Menumbalkan Pekerja Demi Keuntungan Semata, Kebobrokan & Arogansi Modal Tiongkok dibalik Hilirisasi Nikel di Morowali." WALHI. <https://www.walhi.or.id/menumbalkan-pekerja-demi-keuntungan-semata-kebobrokan-arogansi-modal-tiongkok-dibalik-hilirisasi-nikel-di-morowali>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2024. "Ambisi Hilirisasi Nikel dan Masifnya penggunaan Energi Fosil Batubara di Sulawesi Tengah." <https://walhisulteng.org/ambisi-hilirisasi-nikel-dan-masifnya-penggunaan-energi-fosil-batubara-di-sulawesi-tengah/>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2024. “Krisis Air Bersih dan Polusi Udara di Morowali Utara.” <https://walhisulteng.org/krisis-air-bersih-dan-polusi-udara-di-morowali-utara/>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2024. “PLTU Captive A Silent Killer In Morowali.” <https://walhisulteng.org/pltu-captive-a-silent-killer-in-morowali/>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2024. “Hilirisasi Mineral berujung pada Kerugian dan Kriminalisasi Warga di Morowali.” WALHI. <https://www.walhi.or.id/hilirisasi-mineral-berujung-pada-kerugian-dan-kriminalisasi-warga-di-morowali>.

WALHI Sulawesi Tengah. 2024. “WALHI Sulteng : Bencana Ekologis Jadi Langganan Desa Labota, Morowali - WALHI SULTENG | Sulawesi Tengah.” walhi sulteng. <https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-bencana-ekologis-jadi-langganan-desa-labota-morowali/>.

Zuhdi, Naufal, and Media Indonesia. 2024. “Selama 2015-2024, Nilai Investasi PT IMIP Tembus US\$34,3 Miliar.” https://mediaindonesia.com/ekonomi/727369/selama-2015-2024-nilai-investasi-pt-imip-tembus-us343-miliar#goog_rewarded.